



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUDUS**

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	4
1.3	Maksud dan Tujuan .....	7
1.4	Sistematika Penulisan .....	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	44
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	46
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	57
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	58
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	58
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	59
3.3	Program dan Kegiatan .....	60
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	71
BAB V	PENUTUP.....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (DPMPTSP) tahun 2024 merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP secara normatif disusun untuk memenuhi tahapan dalam penyediaan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah. Tata cara, sistematika dan substansi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Prioritas peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Penting dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas DPMPTSP yang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Alokasi anggaran Renja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2024 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin.
2. Mendukung tujuan dan sasaran DPMPTSP
3. Meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan.

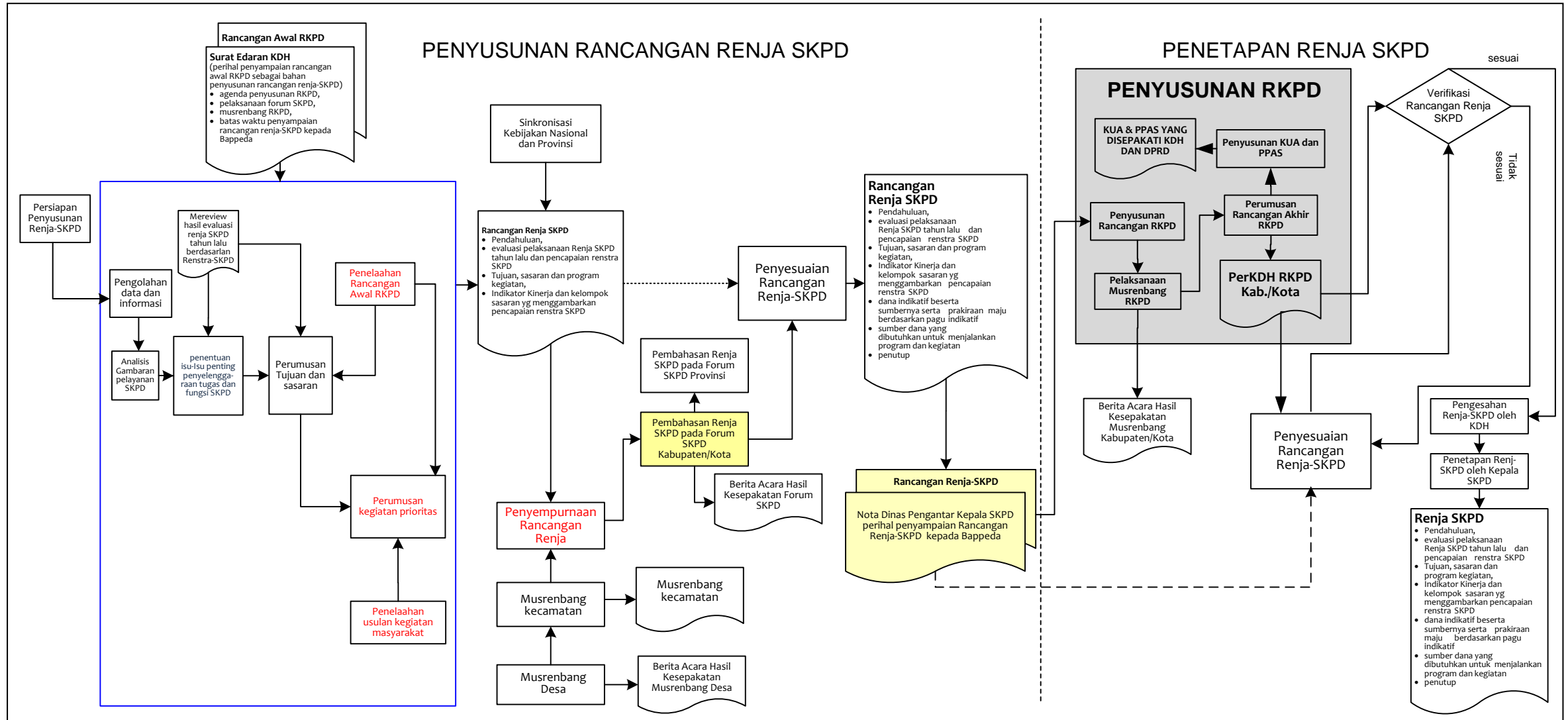
Proses penyusunan Renja PD dimulai dari :

1. Persiapan penyusunan Renja PD
2. Penyusunan rancangan awal Renja PD
3. Penyusunan rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan forum PD/lintas PD
5. Perumusan rancangan akhir Renja PD
6. Penetapan Renja PD

Adapun alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

Bagan Alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD



## 1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

- Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah



Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026;
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan Perangkat Daerah setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program – program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kudus beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Rencana Kerja yang ada pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Provinsi dan Pusat;
3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada pada Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan arah yang jelas dan acuan bagi penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### DAFTAR ISI

#### BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB.III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB.V. PENUTUP

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah, dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah beserta cap/ setempel Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program, kegiatannya dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 100% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 85,67% atau sebesar Rp. 10.552.288.000,- (*Sepuluh milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*)

Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 7 (*tujuh*) program, 13 (*tiga belas*) Kegiatan dan 30 (*tiga puluh*) sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Capaian program-program yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 baik dari realisasi kinerja maupun realisasi anggaran disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Tahun 2022

NO.	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
I.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (PTSP)	83,5 indek	95,23 indeks	5.501.250.971	4.441.151.675
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	63.998.780	52.502.500
3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase peningkatan jumlah investor	8%	-34,0 %	238.999.270	220.786.000
4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai dengan Standar pelayanan	55%	70,75%	5.945.668.100	5.418.810.592
		Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai dengan Standar pelayanan	80%	86,84%		
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi investasi yang dilaporkan	3,30 Trilyun	1,09 Trilyun	439.537.000	312.224.200
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	100%	100%	125.377.500	104.862.900
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					

NO.	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	1.950.000	1.950.000

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 selengkapnya diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. di bawah ini:

Tabel 2.2 (TC-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.18.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (PTSP)</b>	<b>85</b>	<b>82,3</b>	<b>83,5</b>	<b>95,23</b>	<b>114,05%</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data (dokumen) perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun sesuai ketentuan	29 dok	29 dok	29 dok	29 dok	100%	29 dok	29 dok	100%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen program kegiatan dan dokumen perencanaan yang tersusun	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11 dok	11 dok	100%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	100%			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18 Laporan	18 Laporan	100%

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar	29 dok	29 dok	29 dok	29 dok	100%			
		Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar						29 Laporan	29 Laporan	100%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	30 orang	26 orang	26 orang	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						21 orang	21 orang	100%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan	9 orang	9 orang	7 orang	7 orang	100%			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12 dok	12 dok	100%
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	29 dok	29 dok	29 dok	29 dok	100%			

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						17 dok	17 dok	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	100%			
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar						100%	100%	100%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%			
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	37 jenis	37 jenis	37 jenis	37 jenis	100%			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 paket	1 paket	100%



Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu, dan kegiatan lain	2500 orang	1332 orang	2050 orang	305 orang	14,88%			
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 paket	1 paket	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%			

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 kali	15 kali	50 kali	32 kali	64%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50 Laporan	50 Laporan	100%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	33 dok	-	33 dok	33 dok	100%			
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan ( perpres pengadaan barjas dan RKBU )						12 unit	12 unit	100%
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	12 unit	-	72 unit	21 unit	29,17%			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						12 unit	12 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	100%			
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan						6 Laporan	6 Laporan	100%
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2 Laporan	2 Laporan	100%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	6 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						2 Laporan	2 Laporan	100%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHD dan tenaga kontrak	16 orang	1 orang	3 orang	3 orang	100%			

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						2 Laporan	2 Laporan	100%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarpras yang dikelola	13 unit	13 unit	57 unit	57 unit	100%			
		Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar						96 unit	96 unit	100%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	13 unit	12 unit	13 unit	13 unit	100%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						13 unit	13 unit	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	44 unit	44 unit	44 unit	44 unit	100%			

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						44 unit	44 unit	100%
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas/ insentif dibidang PM	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitasi/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang ditetapkan	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%			

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen bahan penyusunan kebijakan tentang kemudahan,fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten						1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi investasi yang dikelola	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	100%	1 sistem	1 sistem	100%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tentang perencanaan Penanaman Modal	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	Jumlah data terbaru dalam peta potensi dan peluang investasi	2 data	1 data	2 data	2 data	100%			
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota						1 dokumen	1 dokumen	100%
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>10%</b>	<b>-27,28%</b>	<b>8%</b>	<b>-34%</b>	<b>-425%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 kali	0 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Jumlah dokumen bahan penyusunan strategi promosi penanaman modal Daerah						1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						1 dokumen	1 dokumen	100%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi	3 jenis	1 jenis	3 jenis	2 jenis	66,67%			
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						3 dok	3 dok	100%
		Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten						3 kegiatan	3 kegiatan	100%
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan</b>	<b>60%</b>	<b>85,00%</b>	<b>55%</b>	<b>70,75%</b>	<b>128,64%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
		<b>persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan</b>	<b>80%</b>	<b>85,00%</b>	<b>80%</b>	<b>86,84%</b>	<b>108,55%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>



Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perijinan terbit sesuai dengan SP	2606 SK	7510 SK	2392 SK	5424 SK	226,76%	2392 SK	2392 SK	100%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan Perizinan dan non perizinan yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	2606 permohonan	2014 permohonan	2392 permohonan	7309 permohonan	305,56%			
		Terbangunnya gedung MPP Tahap 2	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100,00%			
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						2606 pelaku usaha	2606 pelaku usaha	100%

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah perizinan yang memenuhi komitmen dasar dan operasional	460 izin	14 izin	50 izin	23 izin	46,00%			
		Jumlah data (dokumen) fasilitasi pelayanan perizinan pendukung program	26 dok	26 dok	26 dok	26 dok	100,00%			
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal						50 kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	100%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah aduan masyarakat thdp pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan yg telah ditindaklanjuti sampai selesai	15 pengaduan	22 pengaduan	15 pengaduan	5 pengaduan	33,33%			

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						15 orang	15 orang	100%
<b>2.18.05</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Realisasi Investasi yang dilaporkan</b>	<b>3,497 T</b>	<b>0,73 Trilyun</b>	<b>3,300 T</b>	<b>1,09 Trilyun</b>	<b>33,03%</b>	<b>3,497 T</b>	<b>3,497 T</b>	<b>100%</b>
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan penyampaian LKPM	250 perusahaan	380 perusahaan	500 perusahaan	579 perusahaan	115,80%	250 perusahaan	250 perusahaan	100%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang memahami penyampaian LKPM	50 perusahaan	90 perusahaan	270 perusahaan	341 perusahaan	126,30%			
		Jumlah dokumen laporan realisasi dan pembinaan investasi pendukung program	8 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%			

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang terevaluasi	150 perusahaan	210 perusahaan	230 perusahaan	206 perusahaan	89,57%			
		Jumlah dokumen pengawasan Penanaman Modal Pendukung Program	17 dok	17 dok	17 dok	17 dok	100%			
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan						90 Kegiatan usaha	90 Kegiatan usaha	100%
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis</b>	<b>100%</b>	<b>70,65%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dikelola	2 aplikasi	4 jenis	2 aplikasi	2 aplikasi	100%	2 aplikasi	2 aplikasi	100%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data penanaman modal yang terupdate	12 dok	4 jenis	12 dok	12 dok	100%			
		Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100%			
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan						12 dok	12 dok	100%

Kode	Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keg. Tahun 2022			Target program dan kegiatan(Renja Perangkat Daerah tahun2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>3.29.05</b>	<b>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	<b>Cakupan fasilitasi Perizinan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 kali	1 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
3.29.05.2.01.02	Penyusunan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan	2 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%			
		Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota						2 dok	2 dok	100%

**a. Realisasi Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 21 orang dari target 26 orang, tercapai 80,77%
  - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi 305 orang dari target 2050 orang, tercapai 14,88%.
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi 32 kali dari target 50 kali, tercapai 64%
  - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
    - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan terealisasi 21 unit dari target 72 unit, tercapai 29,17%
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terealisasi 0 dokumen dari target 1 dokumen, tercapai 0%
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan target indikator 8% terealisasi -34%, tercapai -425%.
  - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 2 jenis dari target 3 jenis, tercapai 66,67%
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Kegiatan Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal terealisasi 23 izin dari target 50 izin, tercapai 46%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan terealisasi 5 pengaduan dari target 15 pengaduan, tercapai 3,33%
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 3,30 Trilyun terealisasi 1,09 Trilyun, tercapai 33,03%
- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 206 perusahaan dari target 230 perusahaan, tercapai 89,57%

**b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/ keluaran yang direncanakan.**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi 29 dokumen dari target 29 dokumen, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi 11 dokumen dari target 11 dokumen, tercapai 100%
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi 18 dokumen dari target 18 dokumen, tercapai 100%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan terealisasi 29 dokumen dari target 29 dokumen, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terealisasi 7 orang dari target 7 orang, tercapai 100%
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD terealisasi 29 dokumen dari target 29 dokumen, tercapai 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi 16 dokumen dari target 16 dokumen, tercapai 100%.



- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 2 jenis dari target 2 jenis, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi 5 unit dan 37 jenis dari target 5 unit dan 37 jenis, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga terealisasi 7 jenis dari target 7 jenis, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi 6 jenis dari target 6 jenis, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi 6 jenis dari target 6 jenis, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terealisasi 1 jenis dari target 1 jenis, tercapai 100%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 16 dokumen dari target 16 dokumen, tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi 2 jenis dari target 2 jenis, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik terealisasi 3 jenis dari target 3 jenis, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi 3 orang dari target 3 orang, tercapai 100%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi 57 unit dari target 57 unit, tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi 13 unit dari target 13 unit, tercapai 100%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi 44 unit dari target 44 unit, tercapai 100%.

## 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Target indikator sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun penyerapan anggaran dengan realisasi mencapai 82,04% dengan rincian kegiatan/sub kegiatan :

- a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota terealisasi 1 sistem dari target 1 sistem, tercapai 100%.

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen, tercapai 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota terealisasi 2 data dari target 2 data, tercapai 100%.
3. Program Promosi Penanaman Modal
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terealisasi 1 kali dari target 1 kali, tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen, tercapai 100%
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 5 dokumen dari target 5 dokumen, tercapai 100%
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 17 dokumen dari target 17 dokumen, tercapai 100%
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
- a. Kegiatan Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terealisasi 1 gedung dari target 1 gedung, tercapai 100%
    - Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal terealisasi 26 dokumen dari target 26 dokumen, tercapai 100%

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, Sedangkan realisasi anggaran mencapai 83,64%. Kegiatan dan sub kegiatan adalah :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 2 aplikasi dari target 2 aplikasi, tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terealisasi 12 dokumen dan 2 aplikasi dari target 12 dokumen dan 2 aplikasi, tercapai 100%.
  
7. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.  
Target Indikator 100% realisasi 100 %, realisasi anggaran sebesar 100% dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota terealisasi 2 kali dari target 2 kali, tercapai 100%.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen, tercapai 100%.

**c. Realisasi Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan target indikator 83,5 indeks terealisasi 95,23 indeks, capaian sebesar 114,05%.
  
2. Program Pelayanan Penanaman Modal. Program ini memiliki 2 indikator kinerja, antara lain:
  - a. Indikator persentase pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai dengan standar pelayanan dengan target kinerja 55 % dengan realisasi kinerja 70,75%

- b. Indikator persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai dengan standar pelayanan dengan target kinerja 80% dengan realisasi kinerja 86,84%.

Penyerapan anggaran program ini sebesar 91,14%. Kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target terdiri dari :

- a. Kegiatan Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terealisasi 5424 SK dari target 2392 SK, tercapai 226,76%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik terealisasi 7309 permohonan dari target 2392 permohonan, tercapai 305,56%

### 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 579 perusahaan dari target 500 perusahaan, tercapai 115,80%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 341 perusahaan dari target 270 perusahaan, tercapai 126,30%

## **d. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.**

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 21 orang dari target 26 orang, tercapai 80,77%. Realisasi dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada yaitu 21 orang.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi 305 orang dari target 2050 orang, tercapai 14,88%. Capaian sub kegiatan ini rendah karena belanja untuk logistik kantor disesuaikan kebutuhan,

kegiatan rapat dan kunjungan tamu tidak sebanyak sebelum masa pandemi covid 19.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi 32 kali dari target 50 kali, tercapai 64%. Beberapa koordinasi dengan OPD di luar daerah dilakukan melalui daring karena masih masa pandemi sehingga realisasi kinerja tidak dapat mencapai target.

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan terealisasi 21 unit dari target 72 unit, tercapai 29,17%. Capaian sub kegiatan ini masih jauh dari target dikarenakan terdapat beberapa perlengkapan dan peralatan kantor yang harga di pasaran melebihi pagu anggaran dan beberapa barang sudah diskontinu.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terealisasi 0 dokumen dari target 1 dokumen, tercapai 0%. Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian fasilitasi/insentif kemudahan penanaman modal masih berupa draf dan akan disempurnakan menjadi Peraturan Bupati di tahun 2023.

3. Program Promosi Penanaman Modal.

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 2 jenis dari target 3 jenis, tercapai 66,67%. Pelaksanaan promosi yang dilakukan berupa publikasi di surat kabar yang terdiri dari iklan hitam putih dan berwarna sedangkan pencetakan leaflet tentang perizinan belum terlaksana karena masih menunggu dasar Perbup SOP Perizinan.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - a. Kegiatan Pelayanan perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal terealisasi 23 izin dari target 50 izin, tercapai 46%. Capaian yang rendah dikarenakan perizinan pemenuhan komitmen yang ditangani saat ini hanya untuk perizinan pendidikan formal dan non formal, sedangkan perizinan lain yang melalui OSS sudah dilakukan pemantauan bersamaan dengan kegiatan pengawasan penanaman modal.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan terealisasi 5 pengaduan dari target 15 pengaduan, tercapai 3,33%. Realisasi disesuaikan dengan jumlah pengaduan yang diterima dan telah diselesaikan.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target 3,30 Trilyun terealisasi 1,09 Trilyun, tercapai 33,03%

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi 206 perusahaan dari target 230 perusahaan, tercapai 89,57%. Realisasi yang rendah dikarenakan terbatasnya jumlah personil yang melakukan pengawasan ke pelaku usaha, sehingga jumlah perusahaan yang telah dilakukan pengawasan terhadap kewajibannya baik kewajiban perizinannya maupun kewajiban pelaporan LKPM tidak dapat mencapai target.

**e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yang tidak dapat tercapai antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tidak tercapainya target di program ini mengakibatkan kebutuhan sarpras kantor tidak dapat tercukupi sehingga kegiatan rutin di perkantoran tidak dapat terlaksana secara optimal.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada pelaku usaha belum dapat dilaksanakan sehingga belum dapat mendukung untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Belum maksimalnya pelaksanaan promosi investasi mengakibatkan kepeminatan investor untuk berinvestasi menjadi berkurang.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan perizinan kepada pelaku usaha dan pemantauan terhadap perizinan yang tidak optimal mengakibatkan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang mengakibatkan terganggunya kondusivitas iklim investasi di Kabupaten Kudus.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tidak tercapainya target program ini menyebabkan pencapaian target investasi tidak terpenuhi sehingga target pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai.

**f. Kebijakan yang diambil untuk mempertahankan kondisi keberhasilan perencanaan adalah sebagai berikut :**

- 1) Koordinasi dengan bidang-bidang pada tahap perencanaan.
- 2) Pembuatan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Peningkatan ketelitian dalam pembuatan dokumen perencanaan.
- 4) Evaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kudus.**

Dalam menganalisa kinerja pelayanan DPMPTSP didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP 2018 – 2023

Berdasarkan kondisi pencapaian kinerja DPMPTSP sesuai target capaian Renstra dan realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya (tahun 2019-2022) serta proyeksi capaian tahun 2023, maka kinerja DPMPTSP hampir seluruhnya telah memenuhi target yang direncanakan dan diharapkan dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra.

Analisis kinerja pelayanan DPMPTSP selengkapnya dapat dilihat sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2 berikut ini :



**Tabel 2.3 (TC.30)**  
**Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)			-	-	-	-	-	1454	6109	4412	2899	2962	Realisasi sampai dengan TW II 2023
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam Trilyun)			7,59	7,74	8,34	8,79	9,19	5,87	3,26	11,97	10,29	9,19	
3	Rasio daya serap tenaga kerja			-	-	-	-	-	data tidak dikuasai	data tidak dikuasai	data tidak dikuasai	data tidak dikuasai	-	
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMND (milyar rupiah)			-	-	-	-	-	-1254	-2575	8743	-1753	-	
5	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota			-	-	-	-	-	-16,54	-44,45	267,24	-13,96	-	
6	Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah			74	75	75,8	76	76,5	80,05	61,85	78,28	71,70	76,5	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Persentase Pelayanan Perizinan sesuai SP			39,69	40,57	52,33	55,59	70,47	36,62	112,36	85	81,63	70,47	
8	Realisasi Investasi (Trilyun)			7,59	7,74	8,34	8,79	9,19	5,87	3,26	11,97	10,29	9,19	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah		-	81,5	82	83	83,5	85	88,55	80,05	82,30	95,23	85	
10	Persentase Peningkatan Jumlah Investor		-	2%	4%	6%	8%	10%	93,06%	320%	-27,78%	-34%	10%	
11	Realisasi Investasi dilaporkan (Trilyun)		-	2,877	3,02	3,171	3,33	3,497	4,5	1,95	0,73	1,09	3,497	
12	Persentase Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		-	15%	15%	50%	55%	60%	32,44%	24,36%	85%	70,75%	60%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
13	Persentase Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha yang sesuai dengan Standar Pelayanan		-	75%	76%	79%	80%	80%	78%	98%	95%	86,84%	80%	
14	Cakupan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan energi dan Sumber daya Mineral		-	100%	100%	100%	100%	100%	10,80%	0%	20%	100%	100%	
15	Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal		-	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	Indikator Program baru dari hasil pemetaan Permendagri No 90 Tahun 2019
16	Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis		-	-	-	84%	100%	100%	-	-	70,65%	100%	100%	Indikator Program baru dari hasil pemetaan Permendagri No 90 Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus pada tahun 2022 diukur dengan tercapainya Indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja bidang urusan penanaman modal sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain :

1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA).

Jumlah investor pada tahun 2022 sebanyak 2899 investor. Jumlah ini terus mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 yaitu sebanyak 6109 dan 4412 investor. Di tahun 2023 yaitu akhir pencapaian target renstra diharapkan jumlahnya dapat meningkat dibandingkan tahun 2022.

2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

Nilai investasi di tahun 2022 terealisasi sebesar 10,29 Trilyun dari targetnya 8,79 Trilyun. Realisasi ini menurun dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2021 sebesar 11,97 Trilyun.

3. Rasio daya serap tenaga kerja.

Data rasio daya serap tenaga kerja tidak dikuasai oleh Dinas PMPTSP

4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMND.

Nilai realisasi PMDN di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1.753 milyar sedangkan di tahun 2021 nilai realisasi PMDN meningkat sebesar 8.743 milyar.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 yaitu Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 realisasinya menurun sebesar 13,95% sedangkan di tahun 2021 meningkat sebesar 267,24%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program sesuai dengan Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2019-2023 juga menggambarkan kinerja pelayanan Dinas PMPTSP. Indikator tersebut antara lain:

1. Nilai Evaluasi Sakip Perangkat Daerah

Hasil penilaian Sakip tahun 2022 adalah 71,70. Hasil penilaian ini tidak dapat dibandingkan dengan penilaian tahun 2021 sebesar 78,28 karena komponen

dan bobot penilaiannya berbeda. Dari sisi pencapaian predikat masih sama antara tahun 2021 dan 2022 yaitu predikat BB (Sangat Baik).

2. Persentase Pelayanan Perizinan sesuai standar pelayanan.

Pada tahun 2022 persentase pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan terealisasi sebesar 81,63%. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 85%.

3. Realisasi Investasi.

Realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar 10,29 Trilyun dari targetnya 8,79 Trilyun. Meskipun mencapai target tetapi realisasi ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 11,97 Trilyun.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja perangkat daerah.

Indikator ini merupakan indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Realisasi di tahun 2022 sebesar 95,23 dari target 83,5. Realisasi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 82,30.

5. Persentase Peningkatan Jumlah Investor.

Indikator ini merupakan indikator program promosi penanaman modal. Realisasi di tahun 2022 sebesar -34% dari target 8%. Realisasi ini mengalami penurunan bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar -27,78%. Nilai minus menunjukkan bahwa jumlah investor mengalami penurunan.

6. Realisasi Investasi terlaporkan.

Indikator ini merupakan indikator program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Realisasi di tahun 2022 sebesar 1,09 Trilyun dari target 3,3 Trilyun. Realisasi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,73 Trilyun.

7. Persentase Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan yang sesuai dengan Standar Pelayanan.

Indikator ini merupakan indikator program pelayanan penanaman modal. Realisasi di tahun 2022 sebesar 70,75% dari target 55%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 85%, realisasi tahun 2022 mengalami penurunan.

8. Persentase Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha yang sesuai dengan Standar Pelayanan

Indikator ini merupakan indikator program pelayanan penanaman modal. Realisasi di tahun 2022 sebesar 86,84% dari target 80%, bila dibandingkan

dengan realisasi tahun 2021 sebesar 85%, realisasi tahun 2022 mengalami penurunan.

9. Cakupan Fasilitasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan energi dan Sumber daya Mineral.

Indikator ini merupakan indikator program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Realisasi di tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 20%.

10. Cakupan Sinkronisasi Kebijakan Penanaman Modal

Indikator ini merupakan indikator program pengembangan iklim penanaman modal. Realisasi di tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Realisasi di tahun 2021 tercapai sebesar 100%.

11. Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis

Indikator ini merupakan indikator program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Realisasi di tahun 2022 sebesar 100% dari target 100%. Realisasi di tahun 2021 juga tercapai 100%.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang (Permendagri 86/2017).

Isu-isu terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari DPMPTSP Kabupaten Kudus di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi
1.	Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasinya sistem pelayanan SIPTO dengan sistem OSS-RBA (sistem pusat)</li> <li>• Kompetensi dan jumlah SDM yang belum mencukupi</li> <li>• Koordinasi dengan OPD teknis yang belum optimal</li> <li>• Penyediaan data dan informasi penanaman modal yang belum optimal</li> </ul>

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi
2.	Realisasi Penanaman Modal yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya pemberian insentif penanaman modal kepada pelaku usaha</li> <li>• Potensi unggulan daerah belum seluruhnya memiliki dokumen kajian potensi investasi</li> <li>• Fasilitasi kepeminatan penanaman modal yang belum optimal</li> <li>• Promosi investasi yang belum optimal dari segi kualitas dan kuantitas</li> <li>• Pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal yang belum optimal</li> <li>• Belum adanya peta potensi wilayah</li> </ul>

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan diatas terhadap pencapaian Visi Misi Bupati "Memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Berdaya Saing" adalah menurunnya nilai investasi di Kabupaten Kudus.

Dari beberapa permasalahan yang timbul harus dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya antara lain :

1. Menyempurnakan aplikasi perizinan yang digunakan saat ini yaitu SIPTO dan OSS sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan proses perizinannya;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas teknis agar rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen perizinannya;
4. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang materi penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
5. Pembuatan kajian potensi dan peluang investasi yang ada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus;
6. Menyusun kajian potensi investasi yang berkualitas dan menarik sebagai bahan investasi yang ditawarkan melalui kegiatan promosi;
7. Menambah jumlah kegiatan promosi dan meningkatkan kualitas kegiatan promosi yang dilakukan;
8. Memberikan pelayanan perizinan investasi yang lebih mudah dan terjangkau;
9. Mengoptimalkan kegiatan pendampingan pelaporan LKPM ke perusahaan dan melaksanakan sosialisasi pelaporan LKPM;
10. Melakukan pengelolaan data secara terpusat di bidang pengelolaan data;

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus

Adapun tahapan-tahapan review yang dilakukan oleh DPMPTSP adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD
- b. Membandingkan dan merumuskan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja DPMPTSP.
- c. Menuangkan data dalam bentuk tabel matriks sehingga mempermudah dalam mengolah dan menyajikan data.

DPMPTSP sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kudus melaksanakan 6 (*enam*) program, 14 (*empat belas*) Kegiatan dan 35 (*tiga puluh lima*) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.441.472.000,- . Adapun rancangan awal RKPD tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.4 (TC.31)**  
**Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kudus</b>	<b>Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)</b>	<b>36</b>	<b>4.760.916.800</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kudus</b>	<b>Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)</b>	<b>336</b>	<b>5.898.896.800</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kudus</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>19.849.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kudus</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Subgiat Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>19.849.000</b>	
<b>A</b>	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kudus</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	14.995.500	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kudus</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	14.995.500	
<b>B</b>	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Kudus</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 laporan	4.853.500	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Kudus</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 laporan	4.853.500	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Kudus</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA/DPPA</b>	<b>&gt;85%</b>	<b>3.918.091.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Kudus</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA/DPPA</b>	<b>&gt;85%</b>	<b>3.918.091.000</b>	
<b>A</b>	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kudus</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 orang	3.875.911.000	Sub.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kudus</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 orang	3.875.911.000	
<b>B</b>	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Kudus</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	41.280.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Kudus</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	41.280.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kudus	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	900.000	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kudus	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	900.000	
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase BMD yang Dikelola Sesuai Standar Manajemen Aset</b>	<b>100%</b>	<b>16.500.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase BMD yang Dikelola Sesuai Standar Manajemen Aset</b>	<b>100%</b>	<b>16.500.000</b>	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kudus	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	16.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kudus	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	16.500.000	
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</b>	<b>25%</b>	<b>7.310.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</b>	<b>25%</b>	<b>7.310.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kudus	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	7.310.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kudus	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	7.310.000	
5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kudus	<b>Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran yang Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>245.766.800</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kudus	<b>Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran yang Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>245.766.800</b>	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kudus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.534.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kudus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.534.000	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kudus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	64.124.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kudus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	64.124.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kudus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	16.057.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kudus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	16.057.000	
	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kudus	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	58.145.800	Sub.Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kudus	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	58.145.800	
	Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kudus</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.786.000	Sub.Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kudus	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.786.000	
	Sub. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>Kudus</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 dokumen	8.400.000	Sub. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kudus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 dokumen	8.400.000	
	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kudus</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	76.720.000	Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kudus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	76.720.000	
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kudus</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>132.546.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kudus</b>	<b>Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>882.926.000</b>	
	Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kudus</b>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kudus</b>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kudus	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kudus	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	350.000.000	
	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Kudus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	132.546.000	Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Kudus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	182.926.000	
7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>218.000.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>512.000.000</b>	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kudus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	4.000.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kudus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	4.000.000	
	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kudus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	106.000.000	Sub. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kudus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	295.600.000	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kudus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	108.000.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kudus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 lapran	212.400.000	
8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>202.854.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kudus	<b>Persentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>296.454.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kudus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	0	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kudus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 unit	93.600.000	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kudus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	112.400.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kudus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	112.400.000	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kudus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	34.939.000	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kudus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	34.939.000	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	34.075.000	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	34.075.000	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	21.440.000	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kudus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	21.440.000	
II	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	<b>Prosentase Investor yang Mendapat Dukungan Kemudahan Investasi</b>	<b>15%</b>	<b>134.581.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	<b>Prosentase Investor yang Mendapat Dukungan Kemudahan Investasi</b>	<b>15%</b>	<b>134.581.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kudus</b>	<b>Investor yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Kemudahan Berusaha</b>	<b>10 investor</b>	<b>9.581.000</b>	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kudus</b>	<b>Investor yang Mendapatkan Fasilitas/Insentif Kemudahan Berusaha</b>	<b>10 Investor</b>	<b>9.581.000</b>	
	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<b>Kudus</b>	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	4.647.800	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<b>Kudus</b>	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	4.647.800	
	Sub. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<b>Kudus</b>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	10 kegiatan usaha	4.933.200	Sub. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<b>Kudus</b>	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	10 kegiatan usaha	4.933.200	
2	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kudus</b>	<b>Prosentase Kajian Potensi Investasi yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kudus</b>	<b>Prosentase Kajian Potensi Investasi yang Tersusun</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	
2.1	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kudus</b>	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 dokumen	-	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kudus</b>	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	<b>Kudus</b>	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	125.000.000	Sub. Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	<b>Kudus</b>	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	125.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	Persentase Calon Investor yang Merealisasikan Potensi Investasi	10%	274.715.390	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	Persentase Calon Investor yang Merealisasikan Potensi Investasi	10%	274.715.390	
1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kudus	Prosentase Pelaksanaan Promosi	100%	274.715.390	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kudus	Prosentase Pelaksanaan Promosi	100%	274.715.390	
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kudus	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	274.715.390	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kudus	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	274.715.390	
IV	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50,00%	34.903.100	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50,00%	34.903.100	
	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kudus	Persentase Investor yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	30%	34.903.100	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kudus	Persentase Investor yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	30%	34.903.100	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kudus	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 pelaku usaha	17.295.300	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kudus	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 pelaku usaha	17.295.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kudus	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	190 kegiatan usaha	17.607.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kudus	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	190 kegiatan usaha	17.607.800	
V	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	<b>IKM Atas Pelayanan Perizinan</b>	<b>96 indeks</b>	<b>155.921.310</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	<b>IKM Atas Pelayanan Perizinan</b>	<b>96 indeks</b>	<b>294.414.110</b>	
	<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kudus	<b>Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>86%</b>	<b>155.921.310</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kudus	<b>Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>86%</b>	<b>294.414.110</b>	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kudus	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2200 pelaku usaha	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kudus	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2200 pelaku usaha	288.492.800	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kudus	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 orang	5.921.310	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kudus	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 orang	5.921.310	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi	75%	80.434.400	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kudus	Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi	75%	80.434.400	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kudus	<b>Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dirilis ke Publik</b>	<b>100%</b>	<b>80.434.400</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kudus	<b>Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dirilis ke Publik</b>	<b>100%</b>	<b>80.434.400</b>	
	Sub. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kudus	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	80.434.400	Sub. Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kudus	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	80.434.400	
	<b>JUMLAH</b>				<b>5.441.472.000</b>					<b>6.717.944.800</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pagu Indikatif Rancangan RKPD Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 5.441.472.000,- dengan perhitungan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 6.717.944.800,- terdiri dari 6 (enam) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp. 4.760.916.800,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 5.898.896.800,-. Perbedaan ini dikarenakan ada penambahan jumlah anggaran di kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, digunakan untuk pembelian kendaraan dinas dan sarana prasarana kantor yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran tugas rutinitas di Dinas PMPTSP.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sama dengan hasil analisis kebutuhan yaitu sebesar Rp. 134.581.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan di program ini antara lain rapat-rapat koordinasi dan perjalanan luar daerah dalam rangka studi tiru untuk penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian fasilitas/insentif/kemudahan berusaha dan pelaksanaan pemberian fasilitas tersebut kepada pelaku usaha. Kegiatan lain yg juga dilaksanakan adalah pembuatan dokumen kajian potensi investasi.
3. Program Promosi Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sama dengan hasil analisis kebutuhan yaitu sebesar Rp. 274.715.390,-. Kegiatan yang dilaksanakan di program ini adalah mengikuti kegiatan pameran investasi direncanakan dilaksanakan di 2 lokasi.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sebesar Rp. 155.921.310,- sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 294.414.110,-. Perbedaan ini dikarenakan ada penambahan di sub kegiatan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Penambahan kegiatan direncanakan untuk pembuatan Pojok UMKM, Rakor dengan perangkat daerah pemegang hak akses perizinan dan pelayanan tambahan yang dilakukan di Car Free Day (CFD).
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sama dengan hasil analisis kebutuhan yaitu sebesar Rp. 34.903.100,-. Kegiatan yang dilaksanakan di

program ini adalah menyelenggarakan bimtek tentang perizinan berusaha melalui OSS RBA dan cara pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan kewajiban bagi pelaku usaha dengan skala usaha kecil, menengah dan besar.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
 Pagu indikatif pada rancangan RKPD 2024 sama dengan hasil analisis kebutuhan yaitu sebesar Rp. 80.434.400,-. Kegiatan yang dilaksanakan di program ini adalah rapat-rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan data dan pembayaran honorarium jasa konsultasi perorangan yang bertugas mengelola aplikasi di Dinas PMPTSP.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pengajuan usulan program dan kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kudus lewat Musrenbang Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. Para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun perangkat daerah mendapat kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Secara khusus, tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan yang spesifik ditujukan terkait program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kudus.

**Tabel 2.5 (TC. 32)**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kudus**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan pengertian adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi

penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan “payung” tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menyatakan bahwa layanan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kudus, Sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparaturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat. Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SIPTO. SIPTO adalah Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online adalah aplikasi berbasis *web* yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Mengacu pada Renstra DPMPTSP tahun 2024 – 2026, tujuan yang ingin dicapai dalam Renja DPMPTSP sesuai dengan Renstra adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif

Hal yang ingin dicapai dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif adalah meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Kudus. Realisasi investasi yang tinggi diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Terwujudnya tata Kelola pemerintah daerah yang baik

Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan tata Kelola pemerintah daerah yang baik adalah meningkatnya indeks reformasi birokrasi perangkat daerah.

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik investasi
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan

program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024 terdiri dari 6 (*enam*) program, 14 (*empat belas*) Kegiatan dan 32 (*tiga puluh dua*) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.752.996.654,- (Enam milyar tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Pada tahap rancangan akhir rencana kerja tahun 2024, beberapa sub kegiatan mengalami pemutakhiran nama sub kegiatan di sistem SIPD RI. Nama sub kegiatan sebelum dan sesudah pemutakhiran disajikan di dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pemutakhiran Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI				
							Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		
									2024				2024		
									kinerja	Rp.			kinerja	Rp.	
Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP PD	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	36 (kategori : sedang)	5.937.414.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	36 (kategori : sedang)	5.937.414.000
			2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100%	17.963.340	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	100%	17.963.340
			2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 dokumen	12.018.550	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 dokumen	12.018.550
			2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	5.944.790	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	5.944.790
			2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	>85%	3.920.134.260	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	>85%	3.920.134.260
			2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 orang/bln	3.875.911.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 orang/bln	3.875.911.000
			2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	42.499.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	42.499.800



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	1.723.460	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	1.723.460
			2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100%	17.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100%	17.500.000
			2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	17.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	17.500.000
			2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	25%	19.692.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	25%	19.692.000
			2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	19.692.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	19.692.000
			2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100%	310.683.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100%	310.683.400
			2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.528.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.528.000
			2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	65.985.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	65.985.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	16.793.000	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	16.793.000
			2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	98.922.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	98.922.500
			2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	26.748.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	26.748.900
			2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	8.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	8.400.000
			2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	89.306.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan	89.306.000
			2	18	01	2.07		Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	457.878.000	Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	457.878.000
			2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	311.412.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	311.412.000
			2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 unit	146.466.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	91 unit	146.466.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	903.439.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	903.439.000
			2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.190.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.190.000
			2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	292.560.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	292.560.000
			2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	605.689.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	605.689.000
			2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	290.124.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	290.124.000
			2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.650.000
			2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	142.254.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	142.254.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	21.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	21.300.000
			2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	34.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	34.600.000
			2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	47.320.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	47.320.000
			2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	15%	176.895.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	15%	8.205.000
			2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	10 Investor	8.205.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	10 Investor	8.205.000
			2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	4.205.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	8.205.000
								Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	10 kegiatan usaha	4.000.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun.	100%	168.690.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Kajian potensi investasi yang tersusun.	100%	168.690.000
			2	18	02	2.02	0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 dokumen	168.690.000	Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	168.690.000
			2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	10%	203.771.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	10%	203.771.000
			2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelaksanaan promosi	100%	203.771.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pelaksanaan promosi	100%	203.771.000
			2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	203.771.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	203.771.000
Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya daya tarik investasi	Investor yang merealisasikan investasinya	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	96	300.558.374	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	96	300.558.374
			2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	86%	300.558.374	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	86%	300.558.374

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2200 pelaku usaha	294.354.374	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi Secara Elektronik	2200 pelaku usaha	294.354.374
			2	18	04	2.01	0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 orang	6.204.000	Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	10 pelaku usaha	6.204.000
			2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50,00%	53.704.280	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50,00%	53.704.280
			2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	30%	53.704.280	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	30%	53.704.280

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	05	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	250 pelaku usaha	17.558.280	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 pelaku usaha	17.558.280
			2	18	05	2.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	190 kegiatan usaha	36.146.000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	190 kegiatan usaha	36.146.000
			2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	75%	80.654.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	75%	80.654.000
			2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik	100%	80.654.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik	100%	80.654.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Sebelum Pemutakhiran SIPD RI				Setelah Pemutakhiran SIPD RI			
								Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	
										2024				2024	
										kinerja	Rp.			kinerja	Rp.
			2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	80.654.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	80.654.000



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP**

Berikut disajikan Tabel 4.1 (TC-33) tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 :

Tabel 4.1 (TC-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMPTSP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
														NASIONAL	DAERAH					
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						6.752.996.654								6.578.558.000	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.752.996.654								6.578.558.000	
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.752.996.654								6.578.558.000	
1.	2	18	01		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		Nilai	36 Nilai	5.937.414.000							38 Nilai	6.578.558.000	
	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	persen		Persen	100 persen	17.963.340							100 persen	18.700.000	
	2	18	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	12.018.550	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18 Dokumen	13.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	9 Laporan	5.944.790	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9 Laporan	5.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		Persen	>85 persen	3.920.134.260							>87,5 persen	4.296.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	364 Orang/bulan	3.875.911.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		364 Orang/bulan	4.250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	42.499.800	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12 dokumen	45.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	1.723.460	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14 Dokumen	1.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
														NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	18	01	2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah</b>	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		Persen	100 persen	17.500.000					100 persen	17.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	17.500.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Dokumen	17.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		Persen	25 persen	19.692.000					30 persen	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	1 Orang	19.692.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		1 Orang	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		Persen	100 persen	310.683.400					100 persen	288.400.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	4.528.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Paket	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	5 Paket	65.985.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		5 Paket	70.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	16.793.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		4 Paket	17.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	3 Paket	98.922.500	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		3 Paket	70.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	26.748.900	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		1 Paket	28.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK PENDANAAN													
----	------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	PRIORITAS		14	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		17		
											12	13		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	1 dokumen	8.400.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Dokumen	8.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	27 Laporan	89.306.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	40 Laporan	90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	457.878.000					100 Persen	<b>443.958.000</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	311.412.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2 Unit	311412000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	91 Unit	146.466.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	2 unit	132.546.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	903.439.000					100 Persen	<b>1.184.000.000</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	5.190.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 Laporan	4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	292.560.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 Laporan	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	605.689.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	12 Laporan	880.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
														NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	290.124.000					100 Persen	310.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	1 Unit	44.650.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Unit	45.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	10 Unit	142.254.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	11 Unit	145.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	30 Unit	21.300.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	35 Unit	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	34.600.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Unit	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	17 Unit	47.320.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	2 Unit	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan Investasi	Persen	Persen	15 Persen	176.895.000					20 Persen	170.000.000		
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor yang mendapatkan fasilitas /insentif kemudahan berusaha	Investor	Investor	10 Investor	8.205.000			3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	15 investor	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		Dokumen	1 dokumen	8.205.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	1 dokumen	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
										TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
														NASIONAL					DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Presentase Kajian Potensi Investasi yang Tersusun	Persen		Persen	100 Persen	168.690.000				3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	100 Persen	<b>160.000.000</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanam Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	02	2.02	0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota															
						Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 dokumen	168.690.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	1 Dokumen	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
<b>3.</b>	2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	Persen		Persen	10 Persen	<b>203.771.000</b>						20 Persen	<b>300.000.000</b>		
	2	18	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Prosentase Pelaksanaan Promosi	Persen		Persen	100 Persen	203.771.000				3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	100 Persen	<b>300.000.000</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 dokumen	203.771.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	1 Dokumen	300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
<b>4.</b>	2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	IKM atas pelayanan perizinan	indeks		indeks	96 indeks	300.558.374						97 indeks	<b>206.500.000</b>		
	2	18	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Prosentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	Persen		Persen	86 Persen	300.558.374				3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	87 Persen	<b>206.500.000</b>	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik															

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
															NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	2200 Pelaku Usaha	294.354.374	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	2420 Pelaku Usaha	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko															
						Jumlah pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Orang		Orang	10 pelaku usaha	6.204.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	12 Orang	6.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5.	2	18	05		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>	<b>50 Persen</b>	<b>53.704.280</b>						<b>60 Persen</b>	<b>57.000.000</b>		
	2	18	05	2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen		Persen	30 Persen	53.704.280				3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pelaku usaha	40 Persen	57.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha															
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	17.558.280	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pelaku usaha	260 Pelaku Usaha	19.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal															
						Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan Informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha		Kegiatan Usaha	190 Kegiatan Usaha	36.146.000	Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Pelaku usaha	195 Kegiatan Usaha	38.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6.	2	18	06		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>	<b>75 Persen</b>	<b>80.654.000</b>						<b>80 Persen</b>	<b>82.000.000</b>		

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGAM/KEGIATAN/SUB N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGK PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										TARGET 2024	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
														NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dirilis ke Publik	Persen		Persen	100Persen	80.654.000			3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	100 Persen	82.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		Dokumen	12 dokumen	80.654.000		Kab Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Percepatan Transformasi Ekonomi Yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Masyarakat dan pelaku usaha	12 dokumen	82.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
<b>JUMLAH</b>											<b>6.752.996.654</b>									



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja disajikan secara sistematis, mencakup keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapainya melalui berbagai kebijakan dan program.

Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk tahun 2024, sekaligus sebagai parameter atau tolok ukur penilaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.

Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus berisi gambaran masa depan yaitu tahun 2024 yang akan diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran misi ke dalam berbagai kebijakan dan program sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berpedoman pada Renja, diharapkan ada keterpaduan dan ketajaman prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagai upaya penyelesaian berbagai permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibidang perizinan dan penanaman modal, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi secara bertahap.

Kudus, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**HARSO WIDODO, AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731014 199311 1 001